

## MENUJU KESETARAAN GENDER DI SURABAYA, INDONESIA

Sri Endah Kinasih<sup>1\*</sup>, Mochamad Kevin Romadhona<sup>2</sup>, dan Rachmat Dimas Oktafenanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [sriendah.kinasih@fisip.unair.ac.id](mailto:sriendah.kinasih@fisip.unair.ac.id), [mochamad.kevin.romadhona-2020@alumni.unair.ac.id](mailto:mochamad.kevin.romadhona-2020@alumni.unair.ac.id), [rachmat.dimas.oktafenanda-2022@fisip.unair.ac.id](mailto:rachmat.dimas.oktafenanda-2022@fisip.unair.ac.id)

Received: (17-09-2025), Accepted: (31-12-2025), Published Online: (31-12-2025)

### ABSTRAK

Studi ini meneliti kemajuan kesetaraan gender di Surabaya melalui analisis Indeks Pembangunan Gender (PDB) antara tahun 2020 dan 2023, dengan proyeksi hingga tahun 2025. Studi ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, dengan menggunakan data dari BPS Surabaya dan menerapkan pemodelan regresi linier, penelitian ini menangkap lintasan kesetaraan gender di berbagai dimensi kesehatan, pendidikan, dan pencapaian ekonomi. Temuan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan GDI naik dari 93,58 pada tahun 2020 menjadi 95,56 pada tahun 2023, menunjukkan kesetaraan menengah hingga tinggi, meskipun hasil yang dicapai perempuan masih sedikit di bawah laki-laki. Proyeksi menunjukkan peningkatan berkelanjutan, dengan nilai GDI diperkirakan mencapai 96,17 pada tahun 2024 dan 96,86 pada tahun 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa Surabaya sedang menuju kesetaraan gender, meskipun hambatan struktural, khususnya dalam distribusi pendapatan dan partisipasi politik, masih tetap ada. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun peningkatan statistik menyoroti kemajuan yang berarti, intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan tata kelola yang responsif gender sangat penting untuk menerjemahkan kemajuan numerik menjadi kesetaraan substantif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tentang pengarusutamaan gender di perkotaan Indonesia dan menggarisbawahi peran Surabaya dalam memajukan agenda nasional menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender pada tahun 2030.

**Kata kunci:** Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Indeks Pembangunan Berbasis Gender, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

### ABSTRACT

*This study examines the progress of gender equality in Surabaya through an analysis of the Gender Development Index (GDI) between 2020 and 2023, with projections up to 2025. Using secondary data from Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya and applying linear regression modeling, the research captures the trajectory of gender equality across dimensions of health, education, and economic achievement. The findings reveal a consistent upward trend, with the GDI rising from 93.58 in 2020 to 95.56 in 2023, indicating medium-to-high equality, though women's outcomes remain slightly below men's. Projections suggest continued improvement, with GDI values estimated at 96.17 in 2024 and 96.86 in 2025. These results indicate that Surabaya is progressing toward gender parity, though structural barriers particularly in income distribution and political*

*participation persist. The study concludes that while statistical improvements highlight meaningful gains, sustained policy interventions and gender-responsive governance are essential to translate numerical progress into substantive equality. This research contributes to the discourse on gender mainstreaming in urban Indonesia and underscores Surabaya's role in advancing the national agenda toward achieving Sustainable Development Goal 5 on gender equality by 2030.*

**Keywords:** *Gender Equality, Women Empowerment, Gender Development Indeks, Sustainable Development Goal*

## **PENDAHULUAN**

Komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Dhar, 2018); (Kim, 2017); (Esquivel & Sweetman, 2016); (Roy & Xiaoling, 2022), telah menggarisbawahi perlunya memasukkan perspektif gender dalam program pengembangan keluarga dan masyarakat (UN, 2015). Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah diinstitutionalisasi melalui berbagai kebijakan, namun kesenjangan yang terus berlanjut baik di tingkat nasional maupun lokal menunjukkan bahwa hambatan struktural dan normatif masih sangat mengakar (Nurhaeni & Putri, 2025); (Schech & Mustafa, 2010); (Prihatiningtyastuti et al., 2022); (Gayatri, 2025). Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 3,02 juta jiwa pada tahun 2024 (Wenang dkk., 2024), merupakan lokasi perkotaan yang penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Secara demografis, kota ini dicirikan oleh populasi usia produktif yang mencapai sekitar 66% dari penduduknya, memberikan dividen demografis yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi jika kebijakan kesetaraan gender diimplementasikan secara efektif (BPS, 2024).

Meskipun indikator makro positif, ketidaksetaraan gender masih tetap ada. Indeks Pembangunan Gender (PDB) Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 92,15%, yang meskipun menandakan kemajuan, masih menunjukkan kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang (BPS Kota Surabaya, 2023b). Lebih spesifik lagi, tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR) perempuan di Surabaya masih jauh lebih rendah (59,48%) dibandingkan laki-laki (81,92%) (BPS Kota Surabaya, 2023b). Kesenjangan ini mencerminkan interaksi norma sosial budaya, beban pengasuhan, dan akses yang tidak setara terhadap pelatihan keterampilan dan peluang ekonomi (Romadhona, 2022). Lebih lanjut, kekerasan berbasis gender tetap menjadi isu mendesak, dengan kasus yang dilaporkan setiap tahun, menandakan kebutuhan mendesak akan intervensi berbasis keluarga dan masyarakat yang terintegrasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (KPPPA, 2023).

Pada tingkat kelembagaan, Surabaya telah mengembangkan infrastruktur layanan yang berpotensi mendukung perubahan transformatif (Kösters dkk., 2020); (Permatasari dkk., 2020); (Bunnell dkk., 2013); (Renzi & Frenzel, 2025). Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yang didirikan di bawah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat kota, menyediakan dukungan psikososial, pendidikan pengasuhan anak, dan layanan rujukan untuk perempuan dan anak (Shirleyana dkk., 2018); (Dieleman, 2011); (Roberts dkk., 2019); (Novalia dkk., 2020). Bersama dengan

itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempromosikan “Bangga Kencana” Program ini dioperasionalkan melalui kerangka Delapan Fungsi Keluarga, yaitu agama, sosial-budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi-pendidikan, ekonomi, dan bimbingan lingkungan (BPKKBN, 2020). Konvergensi kedua kerangka kerja ini memberikan landasan praktis untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mempromosikan praktik kesetaraan gender di tingkat rumah tangga. Surabaya, sebagai wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memberikan studi kasus yang berharga untuk memahami bagaimana tata kelola perkotaan dapat membentuk dinamika kesetaraan gender. Kota ini telah lama dikenal karena pendekatan proaktifnya terhadap pembangunan sosial, dengan lembaga-lembaga kota memperkenalkan berbagai program responsif gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Terlepas dari upaya-upaya ini, indikator statistik menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada, terutama dalam pendapatan dan partisipasi angkatan kerja, meskipun perempuan menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dalam harapan hidup dan pencapaian pendidikan. Menganalisis kesenjangan ini dalam istilah yang terukur sangat penting tidak hanya untuk menilai efektivitas kebijakan tetapi juga untuk menyelaraskan lintasan Surabaya dengan tujuan pembangunan nasional dan internasional.

Secara teoritis, studi ini dibangun berdasarkan kerangka pemberdayaan Naila Kabeer (1999), yang mengkonseptualisasikan pemberdayaan sebagai proses dinamis yang terdiri dari sumber daya, agensi, dan pencapaian (Kabeer, 1999). Kerangka ini sangat relevan dalam konteks perkotaan, di mana akses perempuan terhadap pelatihan, kapasitas pengambilan keputusan, dan partisipasi ekonomi dipengaruhi oleh struktur sosial dan kelembagaan yang saling terkait (Cornwall, 2016). Sebagai pelengkap, model ketahanan keluarga BKKBN menggarisbawahi peran keluarga sebagai agen utama sosialisasi, perlindungan, dan penyediaan kesejahteraan, sejalan dengan teori yang lebih luas tentang sistem keluarga dan negosiasi peran gender (Walsh, 2016). Mengintegrasikan kedua perspektif ini memberikan lensa analitis multidimensional untuk memahami bagaimana intervensi berbasis keluarga dapat berkontribusi pada hasil kesetaraan gender.

Literatur yang ada tentang gender dan perkembangan keluarga di Indonesia menekankan pengaruh norma sosial yang mengakar dalam membatasi partisipasi ekonomi perempuan (Suryakusuma, 2011); (Utomo dkk., 2021); (Setyonaluri & Utomo, 2024); (Utomo dkk., 2022); (Utomo & McDonald, 2024). Sementara intervensi sebelumnya berfokus pada peningkatan kapasitas individu perempuan, hanya sedikit penelitian yang membahas keluarga sebagai unit perubahan utama. Terlebih lagi, program yang menggabungkan pelatihan kesetaraan gender, pendidikan pengasuhan anak, dan layanan rujukan psikososial masih langka dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengembangkan dan menguji model pelatihan yang berpusat pada keluarga di Surabaya yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) Delapan Fungsi Keluarga BKKBN sebagai kerangka perilaku, (2) layanan psikososial dan rujukan PUSPAGA sebagai dukungan

kelembagaan, dan (3) kerangka pemberdayaan Kabeer sebagai lensa teoritis dan evaluatif.

Indeks Pembangunan Gender (PDB) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPM) adalah dua instrumen penting yang digunakan untuk menangkap aspek multidimensi kesetaraan gender. PDB berasal dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengukur pencapaian relatif perempuan dan laki-laki di berbagai dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, sedangkan IPM mengevaluasi kesetaraan dalam partisipasi politik dan ekonomi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menganalisis indeks-indeks ini, dimungkinkan untuk menilai apakah hasil pembangunan terdistribusi secara adil antara gender. Di Surabaya, statistik BPS menunjukkan bahwa PDB meningkat dari 93,58 pada tahun 2020 menjadi 95,56 pada tahun 2023, menempatkan kota ini dalam kisaran kesetaraan menengah hingga tinggi. Tren peningkatan tersebut menyoroti kemajuan, tetapi kesenjangan yang masih ada menggarisbawahi perlunya intervensi yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemajuan Surabaya menuju kesetaraan gender dari tahun 2020 hingga 2023 dan memproyeksikan kemungkinan perkembangannya hingga tahun 2025. Dengan menerapkan pemodelan statistik dan proyeksi berbasis regresi, studi ini mengukur laju peningkatan Indeks Pembangunan Gender sambil menempatkan temuan ini dalam lanskap kebijakan yang lebih luas tentang pengarusutamaan gender di tingkat kota. Kombinasi analisis numerik dan interpretasi kebijakan menawarkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kesetaraan gender di Surabaya berkembang, dan bagaimana upaya kota ini berkontribusi pada kewajiban nasional Indonesia di bawah SDGs. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang sejauh mana Surabaya berada di jalur yang tepat untuk mencapai kesetaraan gender sebelum tahun 2030 dan tantangan yang masih ada dalam memastikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua dimensi pembangunan.

## **METODE**

Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap status terkini dan lintasan masa depan kesetaraan gender di Surabaya dengan mengandalkan kombinasi analisis data sekunder, pemodelan statistik, dan penilaian interpretatif implikasi kebijakan. Penelitian ini mengambil data primer dari publikasi resmi *Badan Pusat Statistik* (BPS) Surabaya, yang menyediakan pembaruan tahunan tentang Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) di tingkat kota. Indeks-indeks ini berakar pada kerangka kerja Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang mengevaluasi pembangunan manusia di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Untuk tujuan penelitian ini, nilai GDI tahun 2020, 2021, dan 2023 diperlakukan sebagai data dasar yang diamati, karena data tingkat kota yang dapat diandalkan untuk tahun 2022 belum dirilis secara publik. Untuk menilai dinamika kesetaraan gender, analisis menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan

pemodelan regresi linier. Skor GDI yang diamati pertama-tama disusun secara kronologis untuk mengidentifikasi tren yang ada, dengan tahun 2020 (93,58), 2021 (93,90), dan 2023 (95,56) sebagai pengamatan independen. Nilai-nilai ini kemudian diregresikan terhadap waktu (diukur dalam tahun), menghasilkan model prediktif yang digunakan untuk memperkirakan GDI yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya. Hubungan statistik tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier sederhana:

$$Y = \alpha + \beta X$$

di mana  $\hat{Y}$  menunjukkan GDI yang diprediksi,  $\alpha$  mewakili intersep,  $\beta$  menunjukkan kemiringan atau tingkat perubahan tahunan, dan  $X$  sesuai dengan tahun pengamatan. Dengan menggunakan metode ini, proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 dihitung, menghasilkan nilai GDI yang diperkirakan masing-masing sebesar 96,17 dan 96,86. Proyeksi berbasis regresi ini memberikan perkiraan yang berlandaskan matematika namun lugas tentang kemajuan kota menuju kesetaraan gender, sambil mengakui keterbatasan inheren model linier dalam menangkap kompleksitas sosial. Di luar estimasi statistik, studi ini menggabungkan analisis komparatif dengan ambang batas global UNDP untuk kesetaraan gender untuk mengkontekstualisasikan lintasan Surabaya. Skor GDI yang mendekati 100 menandakan hampir kesetaraan antara pria dan wanita, sementara nilai yang jauh di bawah 100 mencerminkan kesenjangan gender yang terus berlanjut. Penurunan rasio Surabaya dari 0,936 pada tahun 2020 menjadi 0,956 pada tahun 2023 dianalisis sebagai indikator peningkatan yang stabil, dengan proyeksi yang menunjukkan penutupan kesenjangan lebih lanjut. Untuk meningkatkan validitas interpretatif, temuan kuantitatif diintegrasikan dengan tinjauan kebijakan yang meneliti inisiatif pengarusutamaan gender di tingkat kota, program pemberdayaan ekonomi perempuan, dan strategi kesetaraan gender berbasis komunitas. Pilihan metodologis untuk menggabungkan pemodelan statistik dengan analisis kebijakan dilakukan secara sengaja, karena memungkinkan penelitian untuk melampaui pelaporan deskriptif angka menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana tata kelola dan intervensi sosial memengaruhi hasil yang terukur. Dengan melakukan triangulasi tren numerik dengan kerangka kerja kelembagaan, studi ini memberikan gambaran holistik tentang kesetaraan gender di Surabaya, menunjukkan kemajuan empiris dan area di mana tindakan kebijakan masih diperlukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Indikator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Surabaya**

No	Indikator	Nilai/Informasi Terbaru	Sumber
1.	Indeks Pembangunan Gender (GDI)	2023: 95,56, dikategorikan sebagai kesetaraan menengah-tinggi; mencerminkan bahwa pria masih memiliki pencapaian yang sedikit lebih tinggi daripada wanita.	BPS Surabaya
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (GEI)	Data tersedia di BPS Surabaya, namun angka pastinya tidak dirilis secara publik. Statistik detail dapat diakses langsung dari BPS.	BPS Surabaya
3.	Tingkat	Surabaya memiliki angka prevalensi stunting	Surabaya.go.

	Stunting Anak	terendah di Indonesia, SSGI 2022 melaporkan 4,8% ( $\pm 923$ balita). Angka tersebut terus menurun sepanjang tahun 2023.	id, Antara Jatim
4.	Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Hukum	Program advokasi pada tahun 2023 melibatkan 150 peserta dari 32 organisasi perempuan untuk memperkuat kapasitas perempuan di bidang politik dan hukum.	Prisma Surabaya
5.	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Program advokasi tahun 2024 yang berfokus pada kemandirian ekonomi perempuan sebagai penggerak pembangunan keluarga dan kota, didukung oleh DP3APPKB & GOW.	DP3APPKB Surabaya
6.	Penghargaan Kesetaraan Gender	Surabaya menerima <i>Anugerah Parahita Ekapraya (APE)</i> –Kategori Mentor, penghargaan nasional tertinggi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.	Suara Surabaya
7.	Program Responsif Gender Lainnya	1. 478 Pusat Dukungan Keluarga ( <i>Puspaga</i> ) di berbagai lingkungan 2. Aplikasi SIAP-PPAK menyediakan konsultasi gratis untuk perlindungan perempuan dan anak. 3. E-Peken Marketplace mendukung 2.835 UMKM yang dipimpin perempuan.	Surabaya.go. id

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah lama diakui sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (McDermott et al., 2025); (Offenhuber, 2019); (Oktaria et al., 2025), khususnya Tujuan 5 (UN, 2015). Dalam konteks tata kelola perkotaan, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengarusutamakan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan layanan (Moser, 2012b); (Cheema, 2020); (Otero-Hermida & Lorenzo, 2020). Surabaya, salah satu kota metropolitan utama di Indonesia, memberikan contoh ilustratif tentang bagaimana tata kelola yang responsif gender dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (PDB) di Surabaya, yang tercatat sebesar 95,56 pada tahun 2023, mencerminkan tingkat kesetaraan yang sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di kota tersebut telah menyempit, meskipun laki-laki masih memiliki tingkat pencapaian yang sedikit lebih tinggi, terutama dalam hal pendidikan, pendapatan, dan hasil kesehatan (BPS Kota Surabaya, 2023a). Sebagai pelengkap PDB, Indeks Pemberdayaan Gender (IPM), meskipun tidak diungkapkan secara publik dalam angka yang rinci, tetap menjadi indikator penting untuk menilai akses perempuan terhadap partisipasi ekonomi dan politik (Kabeer, 1999). Indeks-indeks ini menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender di Surabaya dapat diukur dan dipantau secara sistematis, sejalan dengan agenda pengarusutamaan gender pemerintah Indonesia. (*Inpres No. 9/2000*).

Hasil kesehatan dan gizi semakin memperkuat reputasi Surabaya sebagai kota yang responsif gender (Gordon & True, 2019); (Yunitasari dkk., 2022); (Organisasi Kesehatan Dunia, 2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 melaporkan prevalensi stunting anak di Surabaya hanya 4,8 persen, setara dengan sekitar 923 balita, angka terendah di seluruh negeri. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kebijakan kesehatan lokal yang efektif tetapi juga mencerminkan pendekatan kemampuan Amartya Sen (1999), di mana intervensi kesehatan yang peka gender memperluas kebebasan dan peluang manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Sen, 1999). Penurunan stunting yang berkelanjutan sepanjang tahun 2023 menyoroti keberlanjutan upaya-upaya ini dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Pemberdayaan politik dan hukum juga diprioritaskan. Pada tahun 2023, program advokasi melibatkan 150 peserta dari 32 organisasi perempuan untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum. Hal ini sejalan dengan teori kesetaraan partisipatif Fraser (2009), yang berpendapat bahwa keadilan gender sejati hanya dapat dicapai ketika perempuan memperoleh kedudukan yang setara baik dalam representasi politik maupun ruang pembuatan kebijakan (Fraser, 2009). Inisiatif semacam itu memberikan dukungan struktural untuk meningkatkan agensi kolektif perempuan dalam pemerintahan. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi telah diposisikan sebagai penggerak transformatif bagi ketahanan rumah tangga dan pertumbuhan perkotaan. Program advokasi tahun 2024 yang difasilitasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Surabaya bersama Persatuan Organisasi Perempuan (GOW) menargetkan kemandirian ekonomi perempuan, memperkuat gagasan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi tidak hanya memperkuat kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kota yang berkelanjutan (Cornwall & Rivas, 2015). Dalam hal ini, platform digital *Pasar Elektronik* Program yang mendukung 2.835 usaha mikro dan kecil (UMKM) yang dipimpin perempuan ini merupakan inovasi praktis untuk mengintegrasikan pemberdayaan gender dengan inisiatif ekonomi digital.

Pengakuan nasional semakin menegaskan prestasi Surabaya. Kota ini dianugerahi penghargaan *Anugerah Parahita Ekapraya* (APE) dalam Kategori Mentor, penghargaan nasional tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini menandakan kepemimpinan Surabaya dalam melembagakan tata kelola responsif gender dan menjadi model bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Selain itu, pendirian 478 Pusat Dukungan Keluarga (*Puspaga*) dan pengembangan *SIAP-PPAK* Aplikasi seluler menunjukkan bagaimana inovasi kelembagaan dapat memperkuat infrastruktur sosial untuk kesetaraan gender. Langkah-langkah tersebut menyediakan platform berbasis komunitas yang mudah diakses untuk pendidikan keluarga, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan anak, yang mewujudkan pendekatan holistik terhadap penyampaian layanan yang peka gender. Secara keseluruhan, indikator dan program ini menyoroti komitmen multidimensional Surabaya terhadap kesetaraan gender. Kebijakan kota ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan

terhadap kerangka kerja nasional tetapi juga selaras dengan teori internasional tentang gender dan pembangunan yang menekankan transformasi struktural, tata kelola partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, Surabaya dapat dilihat sebagai model perkotaan terkemuka untuk mengoperasionalkan pengarusutamaan gender menjadi hasil nyata, memajukan agenda nasional dan global untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

**Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Surabaya Terhadap Keluarga yang Adil Gender**

<b>Kebijakan/ Program</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dukungan Institusional</b>	<b>Pemberdayaan</b>	<b>Kerangka Kerja yang Relevan</b>
Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.	Diimplementasikan oleh <i>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)</i> dan <i>Bappeda</i>	Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dalam memastikan tata kelola yang responsif gender.	Teori Pengarusutamaan Gender (Rai, 2008); (PBB, 2015)
Program Ketahanan Keluarga ( <i>Program Ketahanan Keluarga</i> )	Fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan pengasuhan anak, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.	Pusat komunitas ( <i>Pusat Pembelajaran Keluarga – PUSPAGA</i> )	Memperkuat peran perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan keluarga.	Teori Sistem Keluarga (Bowen, 1993); (Sen, 1999)
Inisiatif Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pelatihan keterampilan, dukungan UKM, dan akses ke pembiayaan mikro untuk pengusaha perempuan.	Kolaborasi dengan Bank <i>UMKM Jawa Timur</i> , koperasi, dan LSM	Mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi kerentanan.	Teori Pemberdayaan (Zimmerman, 2000); (Rappaport & Seidman, 2000); (Folbre, 2001)
Pembangunan Perkotaan yang Responsif Gender	Ruang publik yang aman, kebijakan transportasi inklusif, dan program kota ramah anak.	Perencanaan kota oleh <i>Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPKK TR)</i>	Memberikan akses yang setara ke fasilitas umum dan mengurangi risiko berbasis gender.	Feminisme Perkotaan (Beebejaun, 2017); Teori Pembangunan Inklusif (Nussbaum & Sen, 1993)



Pendidikan dan Kepemimpinan untuk Anak Perempuan	Beasiswa, akses STEM untuk anak perempuan, dan pelatihan kepemimpinan.	Kolaborasi dengan sekolah, universitas, dan LSM.	Memberdayakan anak perempuan sebagai pemimpin masa depan dan mengurangi kesenjangan pendidikan.	Teori Modal Manusia (Becker, 1964); Gender dan Pembangunan (Moser, 2012a)
--	--	--	---	---

Sumber: Diedit oleh Penulis, 2024

Pemerintah Kota Surabaya telah menanamkan kesetaraan gender dalam kebijakan pengembangan keluarga melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan dukungan kelembagaan, pemberdayaan berbasis masyarakat, dan transformasi struktural. Inti dari upaya ini adalah Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang melembagakan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Kerangka kebijakan ini, yang konsisten dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG 5) tentang kesetaraan gender (UN, 2015), memastikan bahwa semua program pemerintah bertanggung jawab terhadap prinsip kesetaraan. Landasan teoritis di sini selaras dengan Teori Pengarusutamaan Gender Rai (2008), yang menekankan penanaman analisis gender di seluruh siklus kebijakan untuk menghindari perlakuan isu perempuan sebagai isu pinggiran. Di luar integrasi kelembagaan, Surabaya telah mempromosikan Program Ketahanan Keluarga (*Program Ketahanan Keluarga*) melalui pusat pembelajaran berbasis komunitas (*SETENGAH PEDANG*). Pusat-pusat ini menyediakan konseling keluarga, pendidikan pengasuhan anak, dan strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dari perspektif Teori Sistem Keluarga (Bowen, 1993), penguatan hubungan keluarga berkontribusi pada kesejahteraan antar generasi, sementara Pendekatan Kapabilitas Sen (1999) menggarisbawahi bagaimana program-program ini meningkatkan kebebasan substantif individu dalam rumah tangga. Pemberdayaan ekonomi adalah pilar lain dari strategi Surabaya (Sen, 1999). Dengan menawarkan pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, dan program pengembangan UMKM yang secara khusus menargetkan perempuan, kota ini memungkinkan otonomi dan partisipasi yang lebih besar dalam perekonomian lokal.

Hal ini selaras dengan Teori Pemberdayaan Zimmerman (2000), yang memandang pemberdayaan sebagai proses memperoleh kendali atas sumber daya, keputusan, dan peluang (Zimmerman, 2000). Lebih jauh lagi, penekanan pada kewirausahaan mencerminkan Ekonomi Feminis (Folbre, 2001), yang mengkritik penilaian rendah terhadap kerja tak berbayar perempuan dan mendorong pengakuan mereka sebagai pelaku ekonomi. Pengembangan infrastruktur yang responsif gender juga telah diprioritaskan. Inisiatif kota dalam perencanaan kota, ruang publik yang aman, dan fasilitas ramah anak menunjukkan komitmen kelembagaan untuk membongkar ketidaksetaraan spasial yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan Feminisme Perkotaan (Beebejaun, 2017), yang berpendapat bahwa desain lingkungan perkotaan secara signifikan membentuk pengalaman gender. Hal ini juga menggemakan prinsip-prinsip Teori Pembangunan

Inklusif (Nussbaum & Sen, 1993), yang menekankan akses yang adil terhadap sumber daya dan ruang bagi semua warga negara. Terakhir, Surabaya telah mengintegrasikan inisiatif pendidikan dan kepemimpinan untuk anak perempuan, seperti beasiswa, perluasan akses STEM, dan pelatihan kepemimpinan pemuda. Berlandaskan Teori Modal Manusia (Becker, 1964), program-program ini menekankan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang dari investasi dalam pendidikan perempuan. Selain itu, kerangka kerja Gender dan Pembangunan (GAD) (Moser, 2012a) menempatkan kebijakan-kebijakan ini dalam agenda yang lebih luas untuk mentransformasi ketidaksetaraan struktural, bukan sekadar mengakomodasi perempuan ke dalam sistem yang ada. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini mencerminkan model sinergis pembangunan keluarga yang adil gender, menggabungkan kerangka kerja kelembagaan dengan pemberdayaan masyarakat. Surabaya menunjukkan bagaimana tata kelola perkotaan dapat mengintegrasikan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, dan paradigma pembangunan inklusif untuk mendorong tidak hanya kesejahteraan individu tetapi juga keluarga yang tangguh dan adil.

**Tabel 3. Populasi di Surabaya**

Sumber Data Tahunan	Populasi		
	Pria	Perempuan	Total
Sensus Penduduk 2020 (BPS)	1.425.168	1.449.146	2.874.314
Sensus Formulir Panjang 2022 (BPS)	1.431.041	1.456.182	2.887.223
Proyeksi 2023 (GBS, Surabaya DP3AP2KB)	1.433.967	1.459.731	2.893.698

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024

Populasi Surabaya, berdasarkan berbagai sumber, menunjukkanA Terdapat sedikit dominasi perempuan dibandingkan laki-laki, yang merupakan pola konsisten dari sensus 2020 hingga proyeksi 2023. Menurut Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Surabaya memiliki 2.874.314 penduduk, di mana 1.425.168 adalah laki-laki dan Sebanyak 1.449.146 orang adalah perempuan. Distribusi ini menunjukkan bahwa perempuan mewakili 50,41%. dari populasi tersebut, sementara laki-laki berjumlah 49,59%..Dua tahun kemudian, dalam Sensus Penduduk Bentuk Panjang 2022, total penduduk meningkat menjadi 2.887.223 jiwa, dengan 1.431.041 laki-laki dan 1.456.182 perempuan. Perbedaan proporsional tetap relatif stabil, sekali lagi menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sedikit lebih banyak dari populasi. Pada tahun 2023, proyeksi Pernyataan Anggaran Gender (GBS) memperkirakan populasi sebesar 2.893.698 jiwa, terdiri dari 1.433.967 laki-laki dan 1.459.731 perempuan. Meskipun angka ini bukan sensus melainkan proyeksi, hal ini mencerminkan kesinambungan dalam struktur demografis: perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki di Surabaya.

Rasio Jenis Kelamin (SR) = Sensus 2020

$$SR = \frac{1425167}{1449146} \times 100 = 98,34\% \rightarrow [98 \text{ pria untuk setiap } 100 \text{ wanita di Surabaya}]$$

Rasio Jenis Kelamin (SR0 = Proyeksi 2023)

$$SR = \frac{1433956}{1459731} \times 100 = 98,23\% \rightarrow [98 \text{ pria untuk setiap } 100 \text{ wanita di Surabaya}]$$

Proporsi Gender = 2020

$$P_{male} = \frac{1425168}{2874314} \times 100 = 49,59\%$$

$$Perempuan = \frac{1449146}{2874314} \times 100 = 50,41\%$$

Proporsinya hampir identik dan tetap stabil.

Bukti statistik menunjukkan bahwa Surabaya memiliki distribusi gender yang stabil dengan sedikit dominasi perempuan. Rasio jenis kelamin di bawah 100 secara konsisten menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki di kota ini. Dari perspektif demografis, ini bukanlah fenomena yang tidak biasa di daerah perkotaan di mana perempuan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan tingkat kematian yang sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Distribusi gender ini juga membawa implikasi penting bagi perencanaan kota, kebijakan kesehatan, dan penganggaran yang responsif gender. Misalnya:

- Pelayanan Kesehatan dan Sosial: Dengan perempuan yang membentuk proporsi yang sedikit lebih besar, ada kebutuhan akan perluasan layanan kesehatan ibu, kesehatan reproduksi, dan perawatan lansia, karena perempuan umumnya hidup lebih lama dan lebih banyak terwakili dalam kelompok usia yang lebih tua;
- Partisipasi Ekonomi: Kelebihan jumlah perempuan menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan dan kewirausahaan, untuk mencegah kesenjangan sosial-ekonomi;
- Desain Kebijakan: Tren data yang konsisten, yang diperkuat oleh proyeksi GBS 2023, memberikan landasan demografis yang kuat untuk kebijakan pengarusutamaan gender yang telah diintegrasikan oleh pemerintah kota Surabaya ke dalam program pembangunan.

Singkatnya, angka-angka tersebut mengkonfirmasi struktur demografis yang seimbang tetapi lebih condong ke perempuan, dengan rasio jenis kelamin yang konsisten sekitar 98. Keseimbangan ini stabil di seluruh sensus dan proyeksi, menunjukkan dasar yang dapat diandalkan untuk analisis statistik berbasis gender dan perumusan kebijakan.

**Tabel 4. Formulasi GDI dan SR<sub>HDI</sub>**

Keterangan	Rumus
Kesehatan → Indeks Harapan Hidup (LEI) → Harapan hidup saat lahir (LE)	$HUKUM = \frac{LE - 20}{80 - 20}$
Indeks Pendidikan	$TIDAK = \frac{\sqrt{MYSI \times EYSI}}{1}$
	$MYSI = \frac{MYS}{15} \quad EYSI = \frac{MATA}{18}$
	Catatan MYS = rata-rata tahun sekolah EYS = perkiraan tahun sekolah

Indeks Pendapatan	$II = \frac{Di \text{ dalam (Penghasilan)} - I(100)}{Di \text{ dalam (75.000)} - In(100)}$
HRI (berdasarkan gender)	$HDRI = (LEI \times EI \times II)^{\frac{1}{3}}$
Indeks Pembangunan Gender	$GDI = \frac{HDI_F}{HDI_M} \times 100$
Rasio Jenis Kelamin HDI	$SR_{HDI} = \frac{HDI_F}{HDI_M}$

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024

**Tabel 5. Indeks Pembangunan Gender (GDI/IPG) di Surabaya (2020 - 2023)**

Tahun	GDI	Keterangan
2020	93,58	Sedikit menurun dari tahun 2019 (93,60)
2021	93,90	Peningkatan sepanjang tahun 2020, mempersempit kesenjangan pembangunan gender.
2023	95,56	Kemajuan yang signifikan, kini berada dalam kategori "kesetaraan menengah tinggi"

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, kemajuan Surabaya dalam pembangunan gender paling baik dinilai sebagai perjalanan bertahap menuju kesetaraan, bukan sebagai daftar angka-angka yang terpisah-pisah.

Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (GDI atau IPG) kota ini adalah 93,58. Terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (2019 tercatat 93,60). Pada saat itu, pencapaian pembangunan manusia laki-laki melampaui perempuan di berbagai dimensi inti seperti pendapatan, pendidikan, dan harapan hidup, meskipun pembangunan secara keseluruhan tetap kuat. Pada tahun 2021, gambaran tersebut menjadi lebih menggembirakan. Surabaya mencatat GDI sebesar 93,90, yang mencerminkan peningkatan kesetaraan gender. Meskipun bertahap, peningkatan ini menandakan peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi bagi perempuan. Tahun 2022 tetap menjadi titik buta dalam hal data GDI yang dipublikasikan—tidak ada angka yang ditemukan dalam rilis resmi BPS—menunjukkan adanya kesenjangan dalam statistik yang tersedia untuk umum. Kemudian pada tahun 2023, terjadi kemajuan yang signifikan. GDI Surabaya melonjak menjadi 95,56, membawa kota ini ke dalam kategori "kesetaraan menengah-tinggi". Peningkatan ini mencerminkan peningkatan yang lebih adil, terutama dalam harapan hidup perempuan yang lebih panjang, sementara beberapa keunggulan laki-laki masih tetap ada dalam pencapaian pendidikan dan pengeluaran per kapita. Tren peningkatan selama tiga tahun ini menunjukkan lintasan yang jelas dari penyempitan kesenjangan gender, yang didorong oleh kebijakan progresif dan kemajuan sosial yang meningkatkan hasil pembangunan perempuan.

#### Konsep GDI (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (GDI) mengukur kesenjangan dalam pembangunan

manusia antara pria dan wanita. Indeks ini diturunkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggabungkan: Kesehatan (harapan hidup saat lahir), Pendidikan (rata-rata tahun sekolah + perkiraan tahun sekolah), Standar Hidup Ekonomi (pendapatan nasional bruto atau pengeluaran per kapita). GDI membandingkan IPM perempuan (IPM\_f) dengan IPM laki-laki (IPM\_m).

Meningkatnya PDB Surabaya menunjukkan:

- Dimensi kesehatan: Wanita secara konsisten mengungguli pria karena angka harapan hidup yang lebih tinggi;
- Pendidikan & Ekonomi: Pria masih memiliki keunggulan, tetapi kesenjangan tersebut semakin mengecil, kemungkinan karena meningkatnya akses perempuan ke pendidikan tinggi dan partisipasi dalam angkatan kerja.;
- Efektivitas kebijakan: Program-program responsif gender di Surabaya (misalnya, pelatihan pemberdayaan, dukungan kewirausahaan perempuan, perluasan akses kesehatan) berkorelasi dengan tren peningkatan PDB.

Jika tren ini berlanjut, Surabaya mungkin akan segera mencapai GDI di atas 96 atau 97, mencerminkan hampir kesetaraan dalam pencapaian pembangunan. Tren ini menunjukkan peningkatan yang stabil. Jika pola ini berlanjut, Surabaya akan mendekati tingkat kesetaraan (PDB mendekati 100) dalam beberapa tahun ke depan, yang mencerminkan pencapaian pembangunan manusia yang hampir sama antara pria dan wanita.

**Tabel 6. Prevalensi  $SR_{HDI}$  in Surabaya**

$SR_{HDI}$	Keterangan
0,936	Ketidaksetaraan Moderat
0,939	Sedikit lebih baik
0,956	Mendekati Kesetaraan

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024

#### Catatan:

$SR_{PENYAKIT}$  = Nilai yang mendekati 1 (atau 100 jika dinyatakan sebagai %) menunjukkan kesetaraan yang lebih besar.

Lintasan Surabaya menunjukkan  $SR_{HDI}$  menunjukkan:

- 2020:  $SR_{HDI} = 0,936 \rightarrow$  ketidaksetaraan moderat;
- 2021:  $SR_{HDI} = 0,939 \rightarrow$  sedikit lebih baik;
- 2023:  $SR_{HDI} = 0,956 \rightarrow$  mendekati paritas.

Perbaikan ini signifikan secara statistik dalam hal tren, menunjukkan bahwa varians (kesenjangan) antara skor HDI laki-laki dan perempuan semakin berkurang..

## KESIMPULAN

Analisis lintasan perkembangan demografi dan gender Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023, dengan proyeksi hingga tahun 2025, menunjukkan pergerakan berkelanjutan menuju kesetaraan gender dalam hasil pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender (PDB), yang dihitung dengan membandingkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (PDB) untuk perempuan dan laki-laki di tiga dimensi inti yaitu

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, mengungkapkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2020, PDB Surabaya berada di angka 93,58, mencerminkan kesenjangan yang terukur yang menguntungkan laki-laki dalam hal pencapaian pendidikan dan pendapatan, meskipun perempuan menunjukkan harapan hidup yang lebih panjang. Pada tahun 2021, indeks tersebut telah meningkat sedikit menjadi 93,90, menandakan peningkatan bertahap dalam kesetaraan gender. Kemajuan yang lebih nyata terjadi pada tahun 2023, ketika PPN mencapai 95,56, menempatkan Surabaya dalam kategori kesetaraan menengah hingga tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan selaras dengan kerangka kerja Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNDP) untuk pembangunan gender. Proyeksi berbasis regresi lebih lanjut menunjukkan bahwa PPN Surabaya akan meningkat menjadi sekitar 96,17 pada tahun 2024 dan 96,86 pada tahun 2025, menunjukkan konvergensi antara pencapaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Lintasan ini mencerminkan efektivitas kebijakan responsif gender dan perencanaan inklusif di tingkat kota, khususnya inisiatif yang memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Dari sudut pandang statistik, penyempitan rasio jenis kelamin dalam HDI dari 0,936 pada tahun 2020 menjadi 0,956 pada tahun 2023 memberikan bukti kuantitatif tentang berkurangnya kesenjangan. Perbaikan tersebut sangat selaras dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5, yang menyerukan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015). Kemajuan Surabaya tidak hanya berkontribusi pada komitmen nasional Indonesia di bawah SDGs, tetapi juga menunjukkan bagaimana intervensi lokal, seperti pengarusutamaan gender dalam penganggaran dan program pemberdayaan masyarakat, dapat menghasilkan dampak terukur pada hasil pembangunan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, khususnya dalam mengatasi keunggulan laki-laki yang terus berlanjut dalam hal pendapatan dan pencapaian pendidikan. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya strategi yang ditargetkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, mengurangi kesenjangan upah, dan memastikan kesempatan yang sama untuk kemajuan profesional. Seiring Surabaya terus mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kerangka kebijakannya, kota ini menjadi studi kasus tentang bagaimana tata kelola perkotaan dapat secara efektif mendorong pembangunan manusia yang inklusif gender. Jika tren saat ini dipertahankan, kota ini dapat mencapai kesetaraan hampir sempurna dalam PDB sebelum tahun 2030, sehingga menyelaraskan pencapaian pembangunan lokalnya dengan standar internasional kesetaraan gender dan memperkuat peran Indonesia yang lebih luas dalam memajukan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beebeejaun, Y. (2017). Gender, urban space, and the right to everyday life. *Journal of Urban Affairs*, 39(3), 323-334.  
<https://doi.org/10.1080/07352166.2016.1255526>
- Cheema, S. (2020). Governance for Urban Services: Towards Political and Social Inclusion

- in Cities. In *Governance for Urban Services* (pp. 1–30). Springer.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_1)
- Cornwall, A. (2016). Women's Empowerment: What Works? *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Cornwall, A., & Rivas, A.-M. (2015). From 'gender equality and 'women's empowerment' to global justice: reclaiming a transformative agenda for gender and development. *Third World Quarterly*, 36(2), 396–415.  
<https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1013341>
- Dhar, S. (2018). Gender and Sustainable Development Goals (SDGs). *Indian Journal of Gender Studies*, 25(1), 47–78. <https://doi.org/10.1177/0971521517738451>
- Dieleman, M. (2011). New town development in Indonesia: Renegotiating, shaping and replacing institutions. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 167(1), 60–85.  
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003602>
- Esquivel, V., & Sweetman, C. (2016). Gender and the Sustainable Development Goals. *Gender & Development*, 24(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1153318>
- Gordon, E., & True, J. (2019). Gender Stereotyped or Gender Responsive? *The RUSI Journal*, 164(4), 74–91. <https://doi.org/10.1080/03071847.2019.1666512>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.  
<https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kim, E. M. (2017). Gender and the Sustainable Development Goals. *Global Social Policy*, 17(2), 239–244. <https://doi.org/10.1177/1468018117703444>
- Kösters, M., Bichai, F., & Schwartz, K. (2020). Institutional inertia: challenges in urban water management on the path towards a water-sensitive Surabaya, Indonesia. *International Journal of Water Resources Development*, 36(1), 50–68.  
<https://doi.org/10.1080/07900627.2019.1662378>
- McDermott, R., Sagala, S., Susetyo, N. A., Insan, A., Harahap, W. D. P., Indrarini, A., & Azhari, D. (2025). The role of digital participation platforms in risk-informed development: A case study of Surabaya, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 26, 100430. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2025.100430>
- Novalia, W., Rogers, B. C., Bos, J. J., Brown, R. R., Soedjono, E. S., & Copa, V. (2020). Transformative agency in co-producing sustainable development in the urban south. *Cities*, 102, 102747. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102747>
- Offenhuber, D. (2019). The platform and the bricoleur—Improvisation and smart city initiatives in Indonesia. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 46(8), 1565–1580. <https://doi.org/10.1177/2399808319865749>
- Oktaria, B. Y., Lesmana, S., Juniati, A. T., & Damayanti, S. (2025). Implementation of Sustainable Infrastructure: Case Study in Surabaya City. *The 8th International Conference on Architecture and Civil Engineering*, 615–623.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-96-5654-7\\_57](https://doi.org/10.1007/978-981-96-5654-7_57)
- Otero-Hermida, P., & Lorenzo, R. B. (2020). Gender mainstreaming in Spain: policy

- instruments, influencing factors, and the role of local government. *Local Government Studies*, 46(6), 865–887. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1682556>
- Permatasari, Y. I., Hardjosoekarto, S., & Salomo, R. V. (2020). Institutional Transformation of Public Private Partnership to Ensure Low Transaction Costs: Case Study of Infrastructure Provision at the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia. *Systemic Practice and Action Research*, 33(2), 149–165. <https://doi.org/10.1007/s11213-019-09485-w>
- Renzi, A., & Frenzel, J. (2025). Localized processes of platformization: The example of Surabaya. *Big Data & Society*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/20539517251338776>
- Romadhona, M. K. (2022). Does the Pandemic Affect Unemployment Rate in East Java? (A Study of Pre and Post COVID-19 Pandemic in 2016 to 2021). *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2 SE-Policy Paper), 164–176. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.308>
- Roy, C. K., & Xiaoling, H. (2022). Achieving SDG 5, gender equality and empower all women and girls, in developing countries: how aid for trade can help? *International Journal of Social Economics*, 49(6), 930–959. <https://doi.org/10.1108/IJSE-12-2020-0813>
- Schech, S., & Mustafa, M. (2010). The Politics of Gender Mainstreaming Poverty Reduction: An Indonesian Case Study. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 17(1), 111–135. <https://doi.org/10.1093/sp/jxp025>
- Setyonaluri, D., & Utomo, A. (2024). Negotiating work, family, and traffic: Articulations of married women's employment decisions in Greater Jakarta. *Gender, Work & Organization*, 31(6), 2423–2445. <https://doi.org/10.1111/gwao.13069>
- Shirleyana, S., Hawken, S., & Sunindijo, R. Y. (2018). City of Kampung : risk and resilience in the urban communities of Surabaya, Indonesia. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, 36(5), 543–568. <https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2018-0025>
- Utomo, A., Ananta, A., Setyonaluri, D., & Aryaputra, C. (2022). A second demographic transition in Indonesia? *China Population and Development Studies*, 6(3), 288–315. <https://doi.org/10.1007/s42379-022-00115-y>
- Utomo, A., & McDonald, P. (2024). Beyond later and less marriage in Asia: reflections on Gavin W. Jones' contributions to the scholarship on marriage. *Asian Population Studies*, 20(1), 17–25. <https://doi.org/10.1080/17441730.2023.2236307>
- Utomo, A., McDonald, P., Utomo, I., & Hull, T. (2021). Do Individuals with Higher Education Prefer Smaller Families? Education, Fertility Preference and the Value of Children in Greater Jakarta. *Child Indicators Research*, 14(1), 139–161. <https://doi.org/10.1007/s12187-020-09752-6>
- Walsh, F. (2016). Family resilience: a developmental systems framework. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(3), 313–324. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1154035>
- Wenang, S., Emilia, O., Wahyuni, A., Afdal, A., & Haier, J. (2024). Obstetrics care in Indonesia: Determinants of maternal mortality and stillbirth rates. *PLOS ONE*,



19(7), e0303590. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303590>

Yunitasari, E., Lee, B. O., Krisnana, I., Lugina, R., Solikhah, F. K., & Aditya, R. S. (2022). Determining the Factors That Influence Stunting during Pandemic in Rural Indonesia: A Mixed Method. *Children*, 9(8), 1189. <https://doi.org/10.3390/children9081189>

## BOOK

Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. University of Chicago Press.

Bowen, M. (1993). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.

Bunnell, T., Miller, M. A., Phelps, N. A., & Taylor, J. (2013). Urban development in a decentralized Indonesia: Two Success Stories? *Pacific Affairs*, 86(4), 857–876. <https://doi.org/10.5509/2013864857>

Folbre, N. (2001). *The invisible heart: Economics and family values*. New Press.

Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world* (Vol. 31). Columbia university press.

Nussbaum, M., & Sen, A. (1993). *The quality of life*. Clarendon press.

Rai, S. M. (2008). *The gender politics of development: essays in hope and despair*. Bloomsbury Publishing.

Roberts, M., Sander, F. G., & Tiwari, S. (2019). *Time to ACT: Realizing Indonesia's urban potential*. World Bank Publications.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Knopf.

Suryakusuma, J. I. (2011). *State ibuism: The social construction of womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu.

## BOOK CHAPTER

Gayatri, I. H. (2025). Gender Mainstreaming in ASEAN: Progress and Challenges. In *Routledge Handbook of Human Rights in Southeast Asia* (1st ed., pp. 38–54). Routledge.

Moser, C. (2012a). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.

Moser, C. (2012b). *Gender Planning and Development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203411940>

Prihatiningtyastuti, E., Dayaram, K., & Burgess, J. (2022). Examining gender mainstreaming in Indonesia: a feminist policy analysis. In *A Field Guide to Managing Diversity, Equality and Inclusion in Organisations* (pp. 163–177). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800379008.00024>

Rappaport, J., & Seidman, E. (2000). *Handbook of community psychology*. Springer Science & Business Media.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory. In *Handbook of Community Psychology*

(pp. 43–63). Springer US. [https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2)

### CONFERENCE PROCEEDING

Nurhaeni, I. D. A., & Putri, I. S. (2025). Gender Mainstreaming in Indonesia: The Strategies and Challenges in Realizing Gender Equity and Equality. *Proceedings of the 1st Joint International Conference on Social and Political Sciences: Challenges and Opportunities in the Future (JICSPS 2023)*, 260–270. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-350-4\\_26](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-350-4_26)

### REPORT

BPKKBN. (2020). *Modul 8 fungsi keluarga*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BPS. (2024). *Badan Pusat Statistik. (2024). Proyeksi penduduk Indonesia 2020–2035. Jakarta: BPS.*

BPS Kota Surabaya. (2023a). *Indeks Pembangunan Gender Surabaya 2023*.

BPS Kota Surabaya. (2023b). *Surabaya dalam angka 2023*.

KPPPA. (2023). *Laporan tahunan kekerasan berbasis gender*.

UN. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: UN.

World Health Organization. (2024). *Joint external evaluation of the International Health Regulations (2005) core capacities of Indonesia: mission report, 16-20 October 2023*.